

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan.

Pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien.

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan.

Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit; kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas; serta akuntabilitas atau rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki oleh auditor agar dapat memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan.

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison, 1999) dalam Mabruhi dan Winarna, (2010).

Independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi dan Auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, pendapat ini sejalan dengan penelitian Christiawan (2002) dan Alim *dkk.* (2007). Hal yang sama dilakukan oleh Mardisar *dkk.* (2007), yang memberikan hasil penelitian bahwa pekerjaan dengan kompleksitas rendah berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa pemahaman *good governance* dapat meningkatkan kinerja auditor jika auditor tersebut selama dalam pelaksanaan pemeriksaan selalu menegakkan sikap independensi.

Dalam Standar Umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik seksi 210 PSA No.04, standar umum pertama berbunyi “audit harus dilaksanakan oleh seorang ahli atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman, sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit yang akan dihasilkan (Nataline, 2007).

Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam

melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya, sehingga semakin tinggi tingkat obyektivitas auditor maka semakin baik kualitas audit (Mabruri dan Winarna, 2010).

Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. Menurut Brown dan Stanner (1983) dalam Mardisar dan Sari (2007), perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi (Tubbs, 1992) dalam Mabruri dan Winarna (2010).

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Sunarto (2003) dalam Sukriah, Akram dan Inapty (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

Selain beberapa faktor diatas, faktor akuntabilitas juga dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, karena akuntabilitas sebagai bentuk

dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Mardisar dan Sari (2007) dalam Elisha dan Icuk (2010) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Maburri dan Winarna (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada penambahan variabel Akuntabilitas. Menurut Messier dan Quilliam (1992) dalam Mardiar dan Sari (2007) mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam mengambil keputusan. Selain itu, objek yang akan diteliti pada penelitian ini juga berbeda.

Penelitian sejenis telah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi obyek penelitian yang digunakan biasanya auditor pada Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan pertimbangan di atas serta banyaknya opini masyarakat tentang rendahnya kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah, maka penulis akan meneliti pengaruh faktor-faktor independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, integritas, serta akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada auditor dan pemeriksa di lingkungan pemerintahan disini yaitu pada Kantor Inspektorat

Kota/Kabupaten atau Bawasda yang ada di Madiun, Magetan, Ponorogo dan Ngawi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Terhadap Pemerintah Kota dan Kabupaten Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
3. Apakah obyektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
4. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
5. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?
6. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Untuk menguji adanya pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit.
2. Untuk menguji adanya pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit.
3. Untuk menguji adanya pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil audit.

4. Untuk menguji adanya pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil audit.
5. Untuk menguji adanya pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit.
6. Untuk menguji adanya pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah kota/kabupaten madiun, magetan, ponorogo dan ngawi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam penelitian dibidang *auditing*, khususnya dalam peningkatan kinerja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mengaudit laporan keuangan pada pemerintah daerah kota/kabupaten madiun.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi organisasi SPI (Satuan Pengawas Intern) terutama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga eksternal yang independen dalam melakukan audit laporan keuangan daerah kota/kabupaten madiun.
3. Penelitian mengenai kualitas hasil audit penting bagi SPI dan BPK agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit dan selanjutnya meningkatkannya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berupa penjelasan yang mendasari penelitian ini, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan Pengaruh Independensi, Pengalaman kerja, Obyektivitas, Pengetahuan, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit.

3. BAB III : METODA PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa dan membahas Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Obyektivitas, Pengetahuan, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.